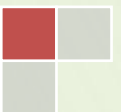




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
TAHUN 2018**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, karena berkat karunia Allah SWT maka kami dapat menyelesaikan tugas menyusun "LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2018". Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj-IP Sekretariat DPRD juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2018 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Berau. LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dalam hal ini masih adanya keterbatasan untuk memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tanjung Redeb, 27 Februari 2019
Sekretaris Dewan,



[Handwritten Signature]
Hj. EVA YUNITA SE, MM
NIP. 19680926 1995 03 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) setiap tahun yang merupakan laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, maka pada tahun 2018 ada 1 (satu) sasaran yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018, dengan 4 (empat) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018, didukung sejumlah sumber daya berupa (a) Dana, dukungan anggaran sebesar Rp. 43.499.273.400,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.314.400.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 37.184.873.400,-. (b) Sumber Daya Manusia, dukungan aparatur berjumlah 96 orang pegawai dengan status 56 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40 orang non PNS. (c) Sarana dan Prasarana.

Disamping adanya faktor pendukung diatas, terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya masih ada sumber daya aparatur yang belum memiliki wawasan yang memadai, sebagai akibat peraturan yang sering berubah-ubah, masih adanya intervensi

pihak luar serta masih dirasakan terbatasnya sarana prasarana perkantoran. Namun demikian dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim yang solid, permasalahan-permasalahan tersebut tidak menjadi hambatan, kemudian sebagai langkah-langkah antisipasi pada kegiatan mendatang maka perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai dan perlunya peningkatan kompetensi pejabat struktural dan staf, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vi
BAB I	PENDAHULUAN	11
	1.1 Latar Belakang	11
	1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	21
	1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2
	1.4 Data Sumber Daya Manusia	3
	1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	6
	2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)	6
	2.2 Indikator Kinerja Utama	9
	2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	10
	2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	14
	3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	14
	3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	16
	3.4 Realisasi Anggaran	26
BAB IV	PENUTUP	30
LAMPIRAN - LAMPIRAN		
Indikator Kinerja Utama		
Lampiran Perjanjian Kinerja		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	4
Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	9
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2018.....	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018.....	13
Tabel 3.1 Indikator kinerja Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2018	15
Tabel 3.2 Indikator kinerja Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018	16
Tabel 3.3 Skala Ordinal	17
Tabel 3.4 Indikator kinerja Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017	17
Tabel 3.5 Indikator kinerja Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017	18
Tabel 3.6 Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	18
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2017 dan Tahun 2018	19
Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2017 dan Tahun 2018	21
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	22
Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018	24
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018.....	26
Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2018	26

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2018	27
Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2018	28
Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018.....	28
Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2018	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi pemerintahan yang baik perlu untuk mengetahui dan mengukur tingkat pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan perbaikan kinerja pada masa-masa yang akan datang. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018 ini disusun. LKj-IP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Berau selama Tahun 2018.

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau setiap akhir Tahun Anggaran wajib menyusun LKj-IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) berlandaskan Panduan Penyusunan yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Bupati Berau melalui Sekretaris Daerah dan merupakan unsur pelayanan terhadap Pimpinan DPRD serta anggotanya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - 2.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Rumah Tangga

- 2.3. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan
3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 3.1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - 3.2. Sub Bagian Pelaporan
 - 3.3. Sub Bagian Akuntansi
4. Bagian Rapat dan Persidangan, membawahkan :
 - 4.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 4.2. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum
 - 4.3. Sub Bagian Humas dan Protokol
5. Kelompok Jabatan Fungsional

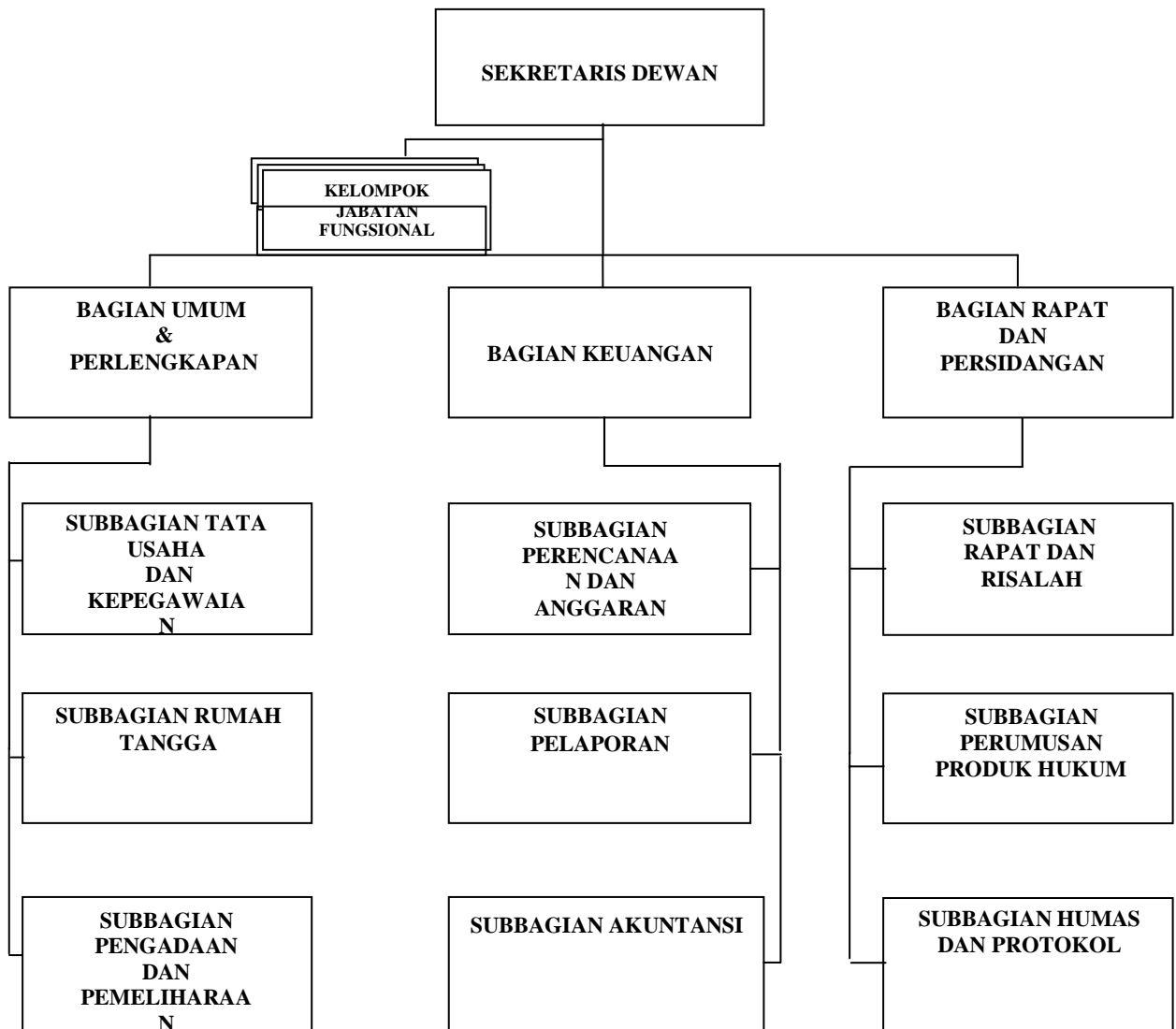
Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sekretariat DPRD kabupaten Berau mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Lampiran : PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 48 TAHUN 2016
 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH



1.4 Data Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Per 31 Desember 2018, memiliki sumber daya manusia sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas)

orang pejabat struktural dan 43 (empat puluh tiga) orang pegawai non struktural serta 40 (empat puluh) tenaga PTT/tenaga kontrak dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

No.	Uraian	TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah
		S3	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD	
1	Struktur ESELON								
	1. Eselon II	-	1	-	-	-	-	-	1
	2. Eselon III	-	1	2	-	-	-	-	3
	3. Eselon IV	-	2	6	1	-	-	-	9
	Sub Jumlah	-	4	8	1	-	-	-	13
2	Pegawai Negeri								
	• III/a	-	-	7	2	3	-	-	12
	• III/b	-	-	3	-	1	-	-	4
	• III/c	-	-	-	-	-	-	-	-
	• III/d	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Gol II								
	• II/a	-	-	-	-	1	-	-	1
	• II/b	-	-	-	-	2	-	-	2
	• II/c	-	-	-	1	19	-	-	20
	• II/d	-	-	-	1	2	-	-	2
	c. Gol I								
	• I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	• I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
	• I/c	-	-	-	-	-	-	2	2
	• I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	3	18	5	34	-	3	43
3.	PTT / Honor	-	-	5	-	30	3	2	40
	Sub Jumlah	-	-	-	-	32	-	-	40
	Jumlah (1+2+3)	-	3	18	5	66	-	3	96

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.
4. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
5. Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
6. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
7. Terkadang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

2.1.1 Visi dan Misi

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu : “Menciptakan tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel” dengan tujuan RPJMD “Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merumuskan tujuan, sasaran dan cara mencapainya melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.

Sasaran : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah.

2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi : 1. Meningkatkan jumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan penetapan peraturan daerah oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan : 1. Pembahasan Raperda tepat waktu.

Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
 6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 9. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 15. Penyediaan Makanan dan Minuman
 16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 17. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 18. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
 19. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 19. Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas
 20. Pengadaan Mebeleur

21. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
23. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan Gedung kantor
24. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
25. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
26. Peningkatan Wawasan Aparatur Pengelola Keuangan
27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
28. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
29. Pembahasan Rancangan peraturan Daerah
30. Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat / Agama
31. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
32. Rapat-rapat Paripurna
33. Kegiatan Reses
34. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
35. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
36. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
37. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
38. Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
39. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD
40. Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
41. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi

pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Tanggung jawab pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya Visi Kabupaten Berau yaitu *“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.”* Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dengan target untuk tahun 2018 yaitu 75 %. Adapun tabel Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	Persen	Menyelenggarakan Fungsi Fasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya dan disetujui/Jumlah Raperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%	RAPERDA, PERDA	Bagian Rapat dan Persidangan

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja (Performance Plan) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau selama tahun berjalan dan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan tujuan sedangkan untuk tingkat kegiatan didefinisikan untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi rencana strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Berdasarkan anggaran Tahun 2018 ada sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD	:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
Kabupaten	:	Berau, Kalimantan Timur			
Tahun Anggaran	:	2018			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				15.641.975.400,00
	1. Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	500 Lembar	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	10.720.000,00
		Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	967.000.000,00
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	2 Jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00
		Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	158.016.000,00

		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	40 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	965.944.000,00
		Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	12 bln	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	387.327.400,00
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	416.920.000,00
		Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 Jenis	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	110.000.000,00
		Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD	60 Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	139.680.000,00
		Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggadandaan	13 Jenis	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadandaan	527.540.000,00
		Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	15 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	67.040.000,00
		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.296.000,00
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	7 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.280.000,00
		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bln	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.120.000.000,00
		Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3 Jenis	Penyediaan Makanan dan Minuman	309.672.000,00
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.492.860.000,00
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	60 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	260.000.000,00
		Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	41 Orang	Penyediaan Jasa Adminstrasi /teknis perkantoran	1.282.680.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.444.180.000,00
		Jumlah Penyediaan Kendraaan Dinas/Operasional	5 unit	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.500.000.000,00
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	14 Jenis	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	204.140.000,00
		Jumlah Pengadaan Mebeleur	2 Jenis	Pengadaan mebeleur	116.720.000,00
		Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1 Gedung	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	240.000.000,00
		Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	1 Paket	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	31.000.000,00

		Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	121.720.000,00
		Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	2 Paket	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	230.600.000,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				21.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	3 Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	21.000.000,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				19.077.718.000,00
		Jumlah Rapat Pembahasan Raperda	35 Kali	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.610.374.000,00
		Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	30 Kali	Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	227.927.000,00
		Rapat rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	70 Kali	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	4.065.554.800,00
		Rapat rapat paripurna dan paripurna istimewa yang terlaksana	16 Kali	Rapat-rapat paripurna	876.073.000,00
		Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	3 Kali	Kegiatan Reses	2.853.040.000,00
		Jumlah Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	6 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	544.600.000,00
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yg diikuti	2 Kali	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.320.015.200,00
		Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	8 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	4.402.508.000,00
		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Chek Up	30 Orang	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	159.672.000,000
		Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia	90 stell	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	124.866.000,00
		Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	12 bln	Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	893.088.000,00

2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja 2018 adalah suatu pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun 2018 sesuai dengan APBD Tahun 2018. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2018 terdapat beberapa sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

- b. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2017 yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Berau pada Tahun 2018 terdapat beberapa rekomendasi agar dilakukan perbaikan, dan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut telah dilaksanakan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang dibuat pada Tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya menyajikan hasil evaluasi realisasi kinerja pada tahun sebelumnya selain realisasi anggaran yang selama ini telah disajikan pada dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD.
2. Dokumen LKj-IP tahun 2018 selain menyajikan perbandingan hasil capaian kinerja (2018) dengan tahun sebelumnya (2017) dalam bentuk narasi tetapi juga dalam bentuk tabel dalam hal perbandingan realisasi anggaran Tahun 2018 dan 2017.
3. Melaksanakan evaluasi program yang telah dilaksanakan melalui pembahasan-pembahasan secara berkala dan berkesinambungan serta memaksimalkan dan memanfaatkan hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan dan kinerja yang akan datang.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau pada tahun 2018 telah membuat dokumen rencana aksi sebagai dokumen pencapaian kinerja, realisasi program/kegiatan maupun monitoring dan evaluasi.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018 yang telah disepakati. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Misi dan tujuan Sekretariat DPRD. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2018 sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Target beserta realisasi sasaran tersebut adalah :

Tabel 3.1 Indikator kinerja Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2018

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75	100	133,33%

Fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dengan target 75 % dan Realisasi dengan Persentase 100%, yakni dari 10 Raperda yang diusulkan untuk dibahas dan disetujui DPRD kesemuanya telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau pada tahun 2018 maka prosentase capaian kinerja sebesar 133,33%.

b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Target beserta realisasi sasaran pada tahun 2018 adalah :

Tabel 3.2 Indikator kinerja Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	100%

Target nilai/hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah pada tahun 2018 yaitu Kategori B dan realisasi juga dalam Kategori B.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2018 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut.

Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Skala Ordinal

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Nilai Capaian
I	85 % keatas	Sangat berhasil
II	70 % ≤ x 85 %	Berhasil
III	55 % ≤ x 70 %	Cukup Berhasil
IV	≤ x 55 %	Kurang Berhasil

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 target persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dengan target 75 % maka kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sudah melampaui target kinerja dengan Persentase 100%, yakni dari 10 Raperda yang diusulkan untuk dibahas dan disetujui DPRD kesemuanya telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau pada tahun 2018. Adapun target beserta realisasi pada tahun 2017 adalah :

Tabel 3.4 Indikator kinerja Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	37	50	135,14%

Jika dibandingkan dengan jumlah Raperda yang diusulkan untuk dibahas dan disetujui pada tahun 2017 dengan pencapaian 50% maka tahun 2017 dan tahun 2018 secara prosentase memiliki nilai yang hampir sama. Namun apabila dilihat dari peningkatan target yang ingin dicapai pada tahun 2018 maka terjadi peningkatan target dari 37% menjadi 75%, demikian juga dengan realisasi terjadi peningkatan dari 50% menjadi 100%.

Sedangkan Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Target beserta realisasi sasaran pada tahun 2017 adalah :

Tabel 3.5 Indikator kinerja Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	100%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 target nilai/hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah yaitu Kategori B maka kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan capaian nilai/hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah pada tahun 2017 maka pencapaian kinerja masih sama.

Adapun berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2018 masuk dalam kategori Sangat berhasil karena berada pada rentang capaian 85 % keatas.

Sedangkan berdasarkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1 Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	100%	37%	75%	75%	75%	75%

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tersebut maka realisasi kinerja pada tahun 2018 melampaui target yang ditetapkan pada target jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Selanjutnya capaian kinerja per program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program penunjang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD maupun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Capaian kinerja yang memiliki realisasi tinggi dalam program pelayanan administrasi perkantoran yaitu diantaranya kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 100%, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 100%, penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah sebesar 100%, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebesar 100% penyediaan jasa kebersihan kantor 100%, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja sebesar 100%, penyediaan alat tulis kantor sebesar 100%, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 100%, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar 100%, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar 108,33% dan penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran sebesar 97,56%. Adapun rinciannya dan perbandingan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2017 dan Tahun 2018

No.	Kegiatan	Keluaran Tahun 2018			Keluaran Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	500 Lembar	52 Lembar	10,4	2.000 Lembar	260 Lembar	13
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100

4	Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Gedung	1 Gedung	100	1 Gedung	1 Gedung	100
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40 Unit	31 Unit	77,5	73 Unit	66 Unit	90,41
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 Jenis	10 Jenis	100	12 Bulan	12 Bulan	100
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Jenis	60 Jenis	100	12 Bulan	12 Bulan	100
10	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	13 Jenis	9 Jenis	69,23	12 Bulan	12 Bulan	100
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	100	12 Bulan	12 Bulan	100
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	3 Jenis	75	15 Unit	40 Unit	266,67
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Paket	7 Paket	100	2 Paket	3 Paket	150
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
15	Penyediaan makanan dan minuman	3 Jenis	3 Jenis	100	12 Bulan	12 Bulan	100
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	13 Kali	108,33	12 Kali	12 Kali	100
17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 Kali	57 Kali	95	12 Bulan	12 Bulan	100
18	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	41 Orang	40 Orang	97,56	12 Bulan	12 Bulan	100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana sangatlah diperlukan guna menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Dari rencana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang ada capaian kinerja realisasi fisik untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%, Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas sebesar 50%, Pengadaan Mebeleur mencapai 100%, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor mencapai 100%, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 100%, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor mencapai 50%, dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor mencapai 50%,. Dengan terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada

tahun 2018 ditambah dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sebelumnya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Berau. Adapun rinciannya dan perbandingan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2017 dan Tahun 2018

No.	Kegiatan	Keluaran Tahun 2018			Keluaran Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	5 Unit	100	-	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	14 Jenis	7 Jenis	50	6 Paket	5 Paket	83,33
3	Pengadaan Mebeleur	2 Jenis	2 Jenis	100	3 Paket	0	0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	100	1 Gedung	1 Gedung	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	1 Paket	1 Paket	100	3 Paket	1 Paket	33,33
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis	1 Jenis	50	3 Jenis	4 Jenis	133,33
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2 Paket	1 Jenis	50	2 Paket	3 paket	150

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk program penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD 100% atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu tersusun 3 laporan dengan nilai LKj-IP B.

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan dengan output yang dihasilkan terdiri dari Renja 2019, Renstra, RKA, DPA, LKj-IP, LPPD, dan Perjanjian Kinerja sehingga tersedianya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja yang berkualitas dengan manfaat yang diperoleh terpenuhinya

dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja yang secara lebih rinci dan perbandingan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018

No.	Kegiatan	Keluaran Tahun 2018			Keluaran Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100

4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Berau menghasilkan sebanyak 10 perda dari 10 raperda yang diusulkan untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD. Sehubungan dengan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Berau untuk Tahun 2018 yaitu Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui dengan target 75 % maka kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sudah melampaui target kinerja dengan Persentase 100%, yakni dari 10 Raperda yang diusulkan untuk dibahas dan disetujui DPRD kesemuanya telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau pada tahun 2018.

Realisasi untuk Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama diselenggarakan sebanyak 29 kali dari target pelaksanaan 30 kali atau sebesar 96,67%. Penyelenggaraan Rapat-rapat alat kelengkapan dapat berjalan dengan baik dan mencapai 112 kali pelaksanaan atau 160% dari target pelaksanaan, terutama rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD. Sementara itu rapat-rapat paripurna mencapai 131,25% dalam realisasinya, yaitu 21 kali rapat paripurna / rapat paripurna istimewa dari target kinerja sebanyak 16 kali pelaksanaan. Pelaksanaan Kegiatan Reses 3

Kali Pelaksanaan, dengan capaian kinerja tersebut diharapkan dapat terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses.

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 6 kali dan terealisasi sebanyak 10 kali. Kegiatan ini merupakan salah satu sasaran strategis guna mendorong terlaksananya fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan dalam daerah.

Bimtek/Workshop/Seminar yang dijadwalkan untuk diikuti oleh anggota DPRD yaitu sebanyak 2 kali pelaksanaan. Pada pelaksanaannya untuk Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD keseluruhan pada tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 1 kali yang yaitu di Balikpapan. Adanya anggota dewan yang tidak mengikuti kegiatan Bimtek karena adanya kepentingan yang bersamaan pada jadwal pelaksanaan bimtek sehingga tidak dapat mengikuti jadwal bimtek. Sedangkan 1 kali pelaksanaan Bimtek yaitu dilaksanakan oleh Partai Politik dan diikuti oleh anggota dewan sepanjang prosedur dan Pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah terealisasi sebesar 162,5% dengan target kinerja Sebanyak 8 kali kunjungan dan terealisasi sebanyak 13 kali. Besarnya jumlah realisasi untuk kegiatan ini didukung oleh Ketersediaan anggaran dan Kesiapan dewan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja. Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD.

Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD terlaksana dengan capaian kinerja 100%, yaitu dari target 30 orang anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Chek Up. Pada Kegiatan Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia sebanyak 90 stell dari target 90 stell.

Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan terlaksana 100 % yaitu sebanyak 12 bulan dari target pelaksanaan sebanyak 12 bulan. Adapun rinciannya dan perbandingan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

No.	Kegiatan	Keluaran Tahun 2018			Keluaran Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Perda	10 Perda	100	18 Perda	9 Perda	50
2	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokon Masyarakat/Tokoh Agama	30 Kali	29 Kali	96,67	20 Kali	25 Kali	125
3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	70 Kali	112 Kali	160	60 Kali	123 Kali	205
4	Rapat-Rapat Paripurna	16 Kali	21 Kali	131,25	12 Kali	13 Kali	92,31
5	Kegiatan reses	3 Kali	3 Kali	100	3 Kali	2 Kali	66,67
6	Kunjungan Keraja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6 Kali	10 Kali	166,67	7 Kali	11 Kali	157,14
7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	2 Kali	100	3 Kali	3 Kali	100
8	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	8 Kali	13 Kali	162,5	7 Kali	9 Kali	77,78
9	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	-	-
10	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	90 Stell	90 Stell	100	60 Stell	-	-
11	Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	100	2 Bulan	2 Bulan	100

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Berau antara lain :

- a. Keterlambatan pengajuan Raperda dari instansi terkait kepada DPRD Kabupaten Berau mengakibatkan terlambatnya pembahasan raperda.
- b. Kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.
- c. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi sehingga perlu memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya yang terkadang menghambat kelancaran administrasi.
- d. Kurangnya tenaga atau staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau terutama pada bagian Keuangan yang mengakibatkan tenaga yang ada harus rangkap jabatan untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- e. Keterlambatan laporan/SPJ pada beberapa kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Untuk mengatasi Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Berau ada beberapa Solusi yang dapat dilakukan yaitu :

- a. Pengajuan Raperda dari instansi terkait kepada DPRD Kabupaten Berau tepat waktu sehingga pembahasan raperda dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD melalui pelatihan dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Perlu disosialisasikannya segera kepada semua pihak terkait mengenai Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang terjadi sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi.
- d. Perlunya penambahan tenaga/staf di lingkungan Sekretariat DPRD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan administrasi di Sekretariat DPRD.
- e. Lebih cermat lagi dalam menunjuk pejabat penatausahaan keuangan.

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang

telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pelayanan untuk Tahun Anggaran 2018 secara umum dikategorikan berhasil dengan baik.

3.4 Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2018 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 sebesar Rp. 6.314.400.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 5.660.162.780,- atau 89,64%. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung program dan kegiatan sebesar Rp. 37.184.873.400,- dan realisasinya sebesar Rp. 33.304.080.479,- atau 89,56%. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut ini :

1) Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	6.314.400.000,00	5.660.162.780,00	89,64
	Jumlah	6.314.400.000,00	5.660.162.780,00	89,64

2) Belanja Langsung

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. **15.641.975.400,00** dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. **14.602.100.866,00** dengan persentase 93,35%.

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		15.641.975.400	14.602.100.866	93,35
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.720.000	391.000	3,65
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	967.000.000	744.769.508	77,02
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	79.920.000	88,80
4	Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah	158.016.000	151.018.300	95,57

5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	965.944.000	935.431.950	96,84
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	387.327.400	233.504.200	60,29
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	416.920.000	404.917.000	97,12
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	110.000.000	104.265.000	94,79
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	139.680.000	132.572.800	94,91
10	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	527.540.000	513.405.100	97,32
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.040.000	64.058.500	95,55
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.296.000	219.403.200	96,10
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.280.000	73.936.500	68,28
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.120.000.000	1.928.742.500	90,98
15	Penyediaan makanan dan minuman	309.672.000	277.317.800	89,55
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.492.860.000	7.471.844.692	99,72
17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	260.000.000	102.998.726	39,61
18	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	1.282.680.000	1.163.604.090	90,72

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. **2.444.180.000,00** dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. **2.175.983.850,00** dengan persentase 89,03%.

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		2.444.180.000	2.175.983.850	89,03
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000.000	1.332.200.000	88,81
2.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	204.140.000	178.299.250	87,34
3.	Pengadaan Mebeleur	116.720.000	106.057.600	90,86
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	240.000.000	231.782.600	96,58
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	31.000.000	24.824.000	80,08
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	121.720.000	112.990.900	92,83
7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	230.600.000	189.829.500	82,32

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. **21.000.000,00** dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. **10.067.000,00** dengan persentase 47,94%.

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		21.000.000	10.067.000	47,94
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	21.000.000	10.067.000	47,94

d. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 19.077.718.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16.515.928.763,00 dengan persentase 86,57%.

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		19.077.718.000	16.515.928.763	86,57
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.610.374.000	3.083.242.984	85,40
2.	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokon Masyarakat/Tokoh Agama	227.927.000	145.785.000	63,96
3.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	4.065.554.800	3.646.485.155	89,69
4.	Rapat-Rapat Paripurna	876.073.000	685.065.000	78,20
5.	Kegiatan reses	2.853.040.000	2.313.193.000	81,08
6.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	544.600.000	349.899.300	64,25
7.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.320.015.200	959.580.270	72,69
8.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	4.402.508.000	4.295.461.788	97,57

9.	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	159.672.000	92.238.966	57,77
10.	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	124.866.000	117.723.000	94,28
11.	Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	893.088.000	827.254.300	92,63

3) Pencapaian Kinerja Keuangan

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2018

ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Belanja Tidak Langsung (BTL)	6.314.400.000,00	5.660.162.780,00	89,64
II	Belanja Langsung (BL)	37.184.873.400,00	33.304.080.479,00	89,56
	Jumlah	43.499.273.400,00	38.964.243.259,00	89,57

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau terserap 89,64%, dengan sisa dana pada Belanja Langsung Rp. 654.237.220,-. Sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau terserap 89,56%, dengan sisa dana pada Belanja Langsung Rp. 3.880.792.921,-.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi Pemerintah. LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan sarana instropeksi diri bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa akan datang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Berau telah berhasil dengan kategori sangat berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian realisasi keuangan sebesar 89,57%, walaupun dalam pencapaiannya menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal mencakup keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal terkait tugas dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini diharapkan memacu pelaksanaan Good Governence dan Clean Goverment yang melibatkan stakeholder sehingga kedepan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat.